

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan Kejuruan adalah menyiapkan peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan pada bidang tertentu. Pendidikan Kejuruan ini bersifat dinamis artinya harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang selalu berubah, mampu beradaptasi dengan situasi sosial-politik, ekonomi dan bersifat fleksibel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL). Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk mengaktualisasikan model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang merupakan karakteristik dari Sekolah Kejuruan. Konsep dari penyelenggaraan PSG itu sendiri adalah (1) merencanakan dan melaksanakan pendidikan melalui kerjasama sekolah dan industri; (2) pendidikan dapat diselenggarakan di sekolah dan industri (Nurita & Astuti, 2020).

Dual System atau sistem ganda yang dilaksanakan di Indonesia diadopsi dari Jerman, karena sistem ganda yang dilaksanakan di Jerman terbukti efektif dan dapat menekan angka pengangguran (Hummelsheim & Baur, 2014). Pendidikan sistem ganda di Jerman sudah dimulai sejak abad pertengahan dimulai dari pelatihan keterampilan berpangkal dari tempat kerja. Melalui pembelajaran di tempat kerja seseorang dapat mengamati, berpartisipasi, membantu dan mencoba atau mensimulasikan orang yang diamati (Schröder, 2017). Dengan demikian yang menjadikan konsep dasar dari sistem ganda adalah dualitas dan kolaborasi dua tempat pembelajaran yaitu sekolah dan industri.

Di Jerman perusahaan memiliki peran yang dominan, yaitu (1) memutuskan tempat magang dan membuat perjanjian (kontrak) magang; (2) siswa melaksanakan magang 3-4 hari dalam satu minggu dan di sekolah 1-2 hari dalam satu minggu; (3) kelulusan siswa magang didapatkan melalui ujian akhir yang

diselenggarakan oleh jaringan perusahaan atau biasa disebut ujian kamar dagang (Gessler, 2017; Young et al., 2019). Perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian dengan siswa magang harus memiliki syarat tertentu dan telah dilihat kesesuaiannya oleh asosiasi industri yaitu dari segi fasilitas, instruktur yang bersertifikat, rencana dan tujuan pelatihan (Li et al., 2020). Dari segi biaya, perusahaan menginvestasikan dana 84% yang digunakan untuk tunjangan untuk siswa magang, proses praktik, biaya pelatihan, dan juga pembangunan bengkel, sedangkan pemerintah membiayai guru dan pendidikan di sekolah (Chen, 2020; Li et al., 2020).

Selain Jerman banyak negara menyelenggarakan pendidikan sistem ganda seperti Spanyol, Inggris, Swedia, Cina, Korea Selatan dan lain-lain. Alasannya adalah pendidikan sistem ganda (*dual system*) dipandang efektif dalam menekan angka pengangguran, melalui sistem ganda permintaan industri akan tenaga terampil dengan kualitas menengah atas dapat teratasi, dapat mengatasi krisis ekonomi dan keuangan global (Hummelsheim & Baur, 2014). Namun dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda ini terdapat perbedaan terutama dalam pelaksanaan magang kerja, magang kerja ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan perilaku peserta di tempat kerja (Jung & Lee, 2017). Magang kerja dipengaruhi oleh kondisi sosial, struktur kualifikasi dan organisasi kerja di negara tersebut. Seperti di Swiss dalam penilaian dan sertifikasi peserta magang dilakukan di lokasi pembelajaran, hal ini sangat berbeda dengan sistem ganda di Jerman untuk ujian dan sertifikasi dilakukan oleh kamar dagang (Euler & Wieland, 2015).

Magang di Jerman dan Inggris, siswa memperoleh keterampilan di tempat magang, mendapat pengetahuan teknis di sekolah satu hari dalam satu minggu, serta dipersiapkan untuk menjadi karyawan yang multi-ketrampilan, sementara di Spanyol menggunakan durasi waktu penuh untuk pelatihan dan wajib pengalaman kerja sehingga karyawan tidak berkembang melampaui pekerjaannya (Grollmann et al., 2017). Di Swedia perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menyeleksi siswa magang. Kewenangan penerimaan siswa magang diberikan

kepada kebijakan lembaga pendidikan dengan mengutamakan banyaknya jumlah siswa bukan kualitas siswa hal ini menyebabkan siswa tidak memiliki ketrampilan, pengetahuan dan motivasi belajar yang tinggi dan memiliki efek negative terhadap siswa serta institusi (Osieja, 2017).

Dari uraian pelaksanaan magang di beberapa negara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan magang membutuhkan: (1) perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi negara tersebut; (2) pola kerjasama yang jelas antara sekolah dan industri; (3) perlu dilibatkannya industri dalam proses perekrutan siswa magang; (4) perlunya menyesuaikan kurikulum implementatif dengan industri; (5) pentingnya pelaksanaan ujian diakhir kegiatan dari pihak industri.

Di Indonesia pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan. Tujuan PKL berdasarkan Permen tersebut adalah (1) menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang professional pada Peserta Didik; (2) meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan Dunia Kerjadan Dunia Industri (DUDI); (3) menyiapkan kemandirian Peserta Didik untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Sasaran dari program ini adalah sekolah menengah kejuruan dan pendidikan sekolah tinggi vokasi. Melalui program PKL diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply driven* tapi lebih *demand driven* hal ini sesuai dengan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Program PKL ini merupakan bentuk kerjasama dalam rangka memperkuat *link and match* SMK dengan industri dan merupakan cara untuk menggali kompetensi yang di butuhkan di dunia kerja. Selain itu melalui program PKL proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat berjalan dengan efisien dan siswa dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan maupun etos kerja yang sesuai dengan industri.

Sesuai dengan Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan Peserta Didik SMK/MAK di Dalam Negeri Tahun 2021 penetapan jangka waktu PKL diselenggarakan enam bulan untuk jenjang tiga tahun dan 10 bulan untuk jenjang empat tahun, hal ini juga sesuai dengan Buku Panduan Praktik Kerja Lapangan

Sebagai Mata Pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil kesepakatan dengan industri tempat PKL. Dalam kurikulum Merdeka PKL termasuk dalam salah satu mata Pelajaran yang ada di kelas XII semester 6 dan kelas XIII. Sebagai salah satu mata Pelajaran di kurikulum Merdeka program PKL memiliki capaian pembelajaran yaitu (a) peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (jujur, disiplin, komitmen, dan tanggungjawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH dan POS yang berlaku di dunia kerja, (b) peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja, (c) peserta didik mampu menerapkan kompetensi teknis baru/kompetensi yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian, (d) peserta didik mampu melakukan analisis usaha secara mandiri (Rahmatullah et al., 2023).

Untuk menjalankan program PKL sekolah bekerjasama dengan industri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi hal ini tertuang dalam buku pedoman PKL tahun 2021. Pada perencanaan PKL sekolah dan industri bekerja sama dalam hal (1) memetakan kompetensi; (2) menetapkan lokasi, waktu, dan jangka waktu; (3) memetakan penempatan siswa sesuai bidang keahlian; dan (4) penetapan pembimbing PKL. Saat pelaksanaan PKL harus ada persetujuan secara tertulis oleh pihak perusahaan dan proses pelaksanaan terdiri atas (1) penempatan siswa sesuai dengan bidang keahlian; (2) orientasi di tempat kerja; (3) pelaksanaan PKL; (4) mentoring siswa oleh instruktur. Setelah pelaksanaan PKL selesai dijalankan berikutnya siswa akan mengikuti penilaian yang terdiri tiga aspek yaitu sikap, ketrampilan dan pengetahuan. Penilaian ini dilakukan oleh instruktur dan pembimbing yang bersifat komprehensif dengan menggunakan instrument penilaian yang berbeda. Dalam penyelenggaraan PKL untuk melihat atau memantau pelaksanaannya perlu adanya monitoring oleh guru pembimbing minimal satu kali dalam satu periode PKL. Setelah selesai semua kegiatan PKL

untuk melihat hasil ketercapaiannya dilakukan evaluasi dari segi perencanaan dan hasil pelaksanaan hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 50 tahun 2020.

Melalui program PKL diharapkan lulusan sekolah kejuruan ataupun pendidikan vokasi lebih siap dalam bekerja sehingga dapat menekan angka pengangguran karena terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman praktek kerja industri terhadap kesiapan kerja (Wachid & Majid, 2013). PKL juga memiliki manfaat untuk siswa dari segi pekerjaan, karier, dan jaringan pasar kerja (Maertz et al., 2014). Namun dalam kenyataannya pelaksanaan program PKL ini khususnya di Indonesia belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Ketidaktercapaian tujuan ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi baik oleh pihak sekolah, siswa dan pihak industri.

Berdasarkan hasil kajian penelitian sebelumnya, kendala yang dialami oleh tiap sekolah berbeda-beda hal ini tidak terlepas dari segi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, monitoring dan evaluasi. Dalam merencanakan program PKL sekolah belum melibatkan industri dan menyelaraskan program pembelajaran di sekolah dengan industri serta peralatan yang dimiliki oleh sekolah belum sesuai dengan perkembangan teknologi, dan juga kurang siapnya siswa dalam melaksanakan PKL (Umi, Siti & Suriyadi, 2013). Dari segi perencanaan dan pelaksanaan banyak siswa melaksanakan PKL tidak sesuai dengan bidang kompetensinya, dan kurang siapnya siswa dalam melaksanakan PKL (Dwijayati & Finisica, 2021; Hadi et al., 2017; Kamdi & Mulya Dewi, 2019; Putranto, 2017). Dari segi monitoring dan evaluasi kurangnya pengawasan dan monitoring ke lapangan oleh guru pembimbing PKL (Aferi & Waskito, 2019; Ananda Suhartana, 2016) dan kurangnya monitoring dan bimbingan dari pihak industri (Sapitri, 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pentingnya PKL untuk siswa sekolah kejuruan dan juga kenyataan pelaksanaan PKL yang ada di Indonesia, maka muncul pertanyaan bagaimana sistem PKL yang dijalankan dan apakah dengan melaksanakan PKL sekolah kejuruan benar-benar mampu untuk menyiapkan siswanya menjadi tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan

dunia usaha dan dunia industri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu adanya evaluasi mengenai pelaksanaan PKL. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembuat kebijakan supaya dapat mengambil kebijakan terkait keberlanjutan program tersebut. Evaluasi program PKL ini akan dilakukan dengan menggunakan model *Logic*, model evaluasi ini sangat sesuai jika digunakan untuk mengevaluasi suatu program salah satunya adalah program PKL (Arthur, 2021; W.K. Kellogg Foundation, 2004). Dalam model evaluasi *Logic* penilaian dari hasil pelaksanaan PKL dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang ditetapkan model dan hasilnya akurat (Brown, 2012). Pada model evaluasi *Logic* komponen yang akan dievaluasi adalah input, proses, produk dan juga *outcomes* atau dampak yang ditimbulkan (Azis, 2016a; Kalu & Norman, 2018).

Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti. Dalam program keahlian ini siswa mempelajari tentang pembuatan dan pengaplikasian desain rumah maupun furniture. Sesuai dengan spektrum kurikulum tahun 2016 Program Kompetensi Teknik Konstruksi dan Properti dibagi menjadi empat bidang kompetensi yaitu: (1) Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (KGSP), (2) Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan (KJIJ), (3) Bisnis Konstruksi dan Properti (BKP), dan (4) Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). Dalam penelitian ini yang akan dievaluasi adalah bidang kompetensi BKP dan DPIB, karena dua program tersebut sama-sama memiliki jenjang belajar 3 tahun dan melaksanakan PKL di kelas XI. Di DKI Jakarta Program Keahlian TKP masih termasuk salah satu program keahlian yang diminati oleh siswa lulusan SMP, hal ini terbukti terdapat lima SMK Negeri yang memiliki program keahlian TKP khususnya bidang kompetensi DPIB dan BKP yaitu SMK Negeri 1, SMK Negeri 35, SMK Negeri 52, SMK Negeri 56, dan SMK Negeri 58.

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari masing-masing kelompok kerja (Pokja) di lima sekolah tersebut, ternyata pelaksanaan program PKL khususnya pada Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti masih

memiliki kekurangan diantaranya tidak meratanya kemampuan dasar siswa saat melaksanakan PKL, Jumlah industri pasangan yang kurang mencukupi, permintaan jumlah peserta PKL yang sedikit, masih ada industri yang tidak sesuai dengan kompetensi siswa, masih ada sekolah yang belum melakukan penyesuaian kurikulum dengan industri, masih adanya industri yang tidak memiliki MoU dengan sekolah, kurangnya dukungan anggaran saat melaksanakan PKL dan masih adanya guru produktif yang tidak sesuai dengan bidang kompetensinya.

Penelitian evaluasi program PKL ini menggunakan model evaluasi *Logic*. Model evaluasi ini telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian seperti penelitian Reflianto (2018) yang berjudul *Logic Model Evaluation to Work Oriented Education Program Through Joint Madrasah Community*, penelitian Jama (2020) yang berjudul *The Effectiveness of the Logic Evaluation Model in K-13 Curriculum Analysis*, penelitian Clapham dkk (2017) yang berjudul *Using a Logic Model to Evaluate the Kids Together early Education Inclusion Program for Children with Disabilities and Additional Needs*, penelitian Hendarti dkk., (2014) yang berjudul *Analisis Metode Pembelajaran Mata kuliah Kewirausahaan dengan Metode Logic Model*, dan penelitian Azis (2016) yang berjudul *Penerapan Logic Model pada Evaluasi Program Pembelajaran Inovasi Pendidikan*. Arthur (2021) dan Wahyudhiana (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model evaluasi *Logic* dapat digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan.

Penelitian evaluasi ini akan dilaksanakan di SMK Negeri di Jakarta pada program keahlian Teknik Konstruksi dan Properti (TKP) yaitu pada SMK Negeri 1 Jakarta, SMK Negeri 35 Jakarta, SMK Negeri 52 Jakarta, SMK Negeri 56 Jakarta dan SMK Negeri 58 Jakarta. Judul dari penelitian ini adalah “Evaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti (TKP) di SMK Negeri di Jakarta”.

B. Fokus Penelitian

Pelaksanaan PKL di SMK Negeri di Jakarta memiliki banyak permasalahan diantaranya tujuan dari pelaksanaan PKL belum dipahami oleh

siswa, belum diselarasanya kurikulum dengan tujuan PKL dan kondisi di industri, kerjasama dengan industri yang sesuai dengan bidang kompetensi siswa masih kurang, kepercayaan industri terhadap kemampuan siswa masih kurang, banyaknya siswa yang melaksanakan PKL di Industri yang tidak sesuai dengan bidang kompetensi, kurangnya kemampuan siswa baik dari segi *soft skill* dan *hard skill*, kurangnya dukungan orang tua dari segi biaya hingga keterserapan lulusan sekolah kejuruan di industri dan dunia usaha.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen masukan (*input*)?
2. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen proses (*activities*)?
3. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen keluaran (*output*)?
4. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen hasil jangka pendek (*short-term outcomes*)?
5. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen hasil jangka panjang (*long-term outcomes*)?
6. Bagaimana pelaksanaan PKL siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen dampak (*impact*)?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen *input*.
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dilihat dari komponen *activities*.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Kostruksi dan Properti dilihat dari komponen *output*.
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Kostruksi dan Properti dilihat dari komponen *short-term outcome*.
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Kostruksi dan Properti dilihat komponen *long-term outcome*.
6. Mengevaluasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri di Jakarta Program Keahlian Teknik Kostruksi dan Properti dilihat komponen *impact*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk megembangkan penelitian-penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan masukan kepada para *stakeholders* untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan program PKL, sehingga dimasa yang akan datan tujuan dari program prakerin dapat tercapai.

- b. Bagi industri

Sebagai bahan masukan kepada pihak industri sehingga nantinya akan banyak industri yang dapat diajak bekerjasama untuk pelaksanaan program PKL dan sesuai dengan bidang kompetensi siswa.

- c. Bagi siswa

Sebagai bahan masukan atau pandangan kepada siswa tentang pelaksanaan PKL sehingga siswa lebih siap dan memahami tujuan dari pelaksanaan

PKL dan dengan demikian siswa mereka melaksanakan PKL dengan sungguh-sungguh.

